

**PENGARUH KOMPETENSI SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

(Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota)

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

RIEDY RIANDANI

2009/13024

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2017

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
**PENGARUH KOMPETENSI SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN**
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota)

Oleh :

RIEDY RIANDANI
13024/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 108
18 maret 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Februari 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

ABSTRAK

Riedy Riandani (13024 / 2009). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota)

Pembimbing 1 : Henri Agustin, SE, MSc. Ak
Pembimbing 2 : Halmawati, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Pengendalian intern terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 30 SKPD. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari 49 responden. Metode statistik analisis data yang digunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about influence of human resource quality, information technology utilization, and the internal controlling, on local government financial reports . The population in this study is all SKPD in Lima Puluh Kota regency as many as 30 SKPD. This study used questionnaire to collect data from 49 respondents. Statistical methods for data analysis is multiple regression analysis SPSS version 16.0 for windows.

The results of this study indicate that the human resource quality has positive effect on the local government financial reports. information technology utilization doesn't have an effect on local government financial reports and the internal controlling has positive effect on the local government financial reports.

Keywords : *human resource quality , information technology utilization , internal controlling , local government financial reports*

1. PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Salamun (2007) menyatakan bahwa tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisikeuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi komponen laporan keuangan, tetapi juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan.

Laporan keuangan yang ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dan juga bisa dipertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik, karena laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan bagi seluruh entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif sebuah laporan keuangan yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan yang dihasilkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No.24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PPNo.71 tahun 2010) karakteristik laporan keuangan antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jika informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah telah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adapun komponen komponen yang terdapat dalam laporan keuangan yang saat ini berbasis akrual terdiri dari : (1) Laporan realisasi anggaran (2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (3) laporan operasional (4) Laporan perubahan ekuitas (5) Neraca (6) Laporan arus kas (7) Catatan atas laporan keuangan. UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara khususnya pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Motivasi penelitian ini dilakukan karena diantara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut, pemerintah kabupaten Lima Puluh kota merupakan salah satu pemerintah daerah yang hingga tahun 2015 masih belum bisa memperoleh opini WTP (www.bpk.go.id). Pemerintah kabupaten Lima Puluh kota bertahan dengan opini WDP yang diperolehnya untuk 5 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena masih lemahnya kemampuan SDM dan pengendalian internal Pada organisasi pemerintahan saat ini, lemahnya kemampuan SDM tidak hanya diakibatkan oleh kelemahan pengelolaan keuangan daerah sektor administrasi dan birokrasi dan akibat keterbatasan dukungan sumber daya manusia saja, akan tetapi juga ada kelemahan *law enforcement*, yaitu kepatuhan terhadap peraturan, aturan, prosedur serta perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, termasuk penyajian transaksi dan laporan keuangan yang jujur agar informasi yang dihasilkan laporan keuangan tidak hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh pemakai, namun juga bermanfaat dan dapat dipercaya oleh pemakai itu sendiri.

Setiap unit kerja (Satker) kementerian atau lembaga dituntut untuk meningkatkan pengendalian internal mereka dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing satker

(Muzahid, 2014). Berdasarkan data diperoleh informasi yang menunjukkan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat pada tabel 1

Tabel: Hasil Evaluasi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 50 Kota Tahun 2010 – 2015

Tahun	Opini Audit
2010	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: www.bpk.go.id

Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Sumbar menyampaikan hasil pemeriksaan dari pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat OPINI BPK berupa WDP (wajar dengan pengecualian), hal ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pimpinan DPRD, Kepala Daerah, dan Inspektur Kabupaten/Kota, yaitu, hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, masih menunjukkan beberapa kelemahan antara lain, (1) Terdapat Aset yang dicatat sebagai BMD, namun belum didukung bukti kepemilikan, (2) Aset Tetap dicatat ganda dan diantaranya dicatat dengan nilai perolehan yang berbeda, dan (3) Pencatatan dokumen alih fungsi barang milik daerah tidak dilengkapi dengan persetujuan kepala daerah dan belum diterbitkan keputusan Kepala Daerah tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah, (4) Pencatatan pinjam pakai barang milik pemerintah daerah belum sesuai ketentuan dan Pengamanan aset dan barang milik

daerah pada pemerintah daerah yang belum optimal.

Beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diatas membuktikan bahwa masih lemahnya kompetensi SDM dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dan merugikan pemerintah daerah, faktor pemanfaatan TI yang kurang baik dalam pencatatan laporan keuangan berkemungkinan juga ikut mempengaruhi hasil laporan keuangan pemerintah yang diharapkan berkualitas dan mampu untuk dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten di Sumatera Barat yang sampai saat ini memiliki prestasi yang kurang baik dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Kabupaten tersebut mendapat predikat hasil audit dari auditor internal nasional berupa wajar dengan pengecualian (WDP). Jika dilihat dari opini audit, status wajar dengan pengecualian belum menjadi yang terbaik, dan masih perlu ditingkatkan oleh pemerintah, dan kompetensi SDM yang baik dan berkualitas sebagai elemen penting dalam penyusunan laporan keuangan juga mempengaruhi hasil opini laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK nantinya.

Penelitian yang hampir sama pernah dilakukan oleh Emilda (2014), Dalam pengujian hipotesis membuktikan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota. Menurut Hervesi (2005 dalam Indriasari 2008) Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari, keterampilan Pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Desiana wati (2014) juga berpendapat sama Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Desiana wati dkk juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan akan dapat mencegah terjadinya pemborosan waktu serta tenaga,

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini dapat terjadi jika SDM yang dimanfaatkan telah didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang diakui, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahman (2012) menjelaskan bahwa kompetensi, pelatihan dan pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan pertanggung jawaban laporan keuangan satuan Dekonsentrasi satuan kerja Pemerintah Aceh.

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi baik buruknya kualitas laporan keuangan adalah dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto (1995) teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

Dukungan penggunaan teknologi informasi ini juga membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi, khususnya dalam mengantisipasi intensitas perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sering terjadi. Meskipun adanya perubahan laporan keuangan yang sebelumnya *Cash Basis* menjadi *akrual basis*. Pemerintah seharusnya menjadikan ini sebagaitantangan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah tentang Informasi Keuangan Daerah yang menggantikan PP No.11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Sedangkan menurut Widjajanto (2001) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan data-data transaksi yang dari tahun ke tahun semakin besar serta kualitas data yang kian semakin kompleks dan rumit dikarenakan semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ke tahun. Dari sisi akuntansi hal

tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin kompleks dan rumit.

Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta reliable (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan kemampuan manusia.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Dalam PP No 8 Tahun 2006, Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya beberapa hal berikut (1) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, (2) Keandalan dalam Laporan Keuangan. (3) Pengamanan aset Negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kesalahan dan penyalahgunaan

terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal,serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas informasi yang dihasilkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian pada salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat tersebut, sehingga penelitian ini diberi judul: **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Limapuluh Kota)”**

II. Kajian Teori, Kerangka Konseptual dan Hipotesis

1. Teori keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *”nexus of contract”*. Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan perilaku efisiensi atau perilaku opportunistik bagi si Agen. Pada organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau

tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia dalam mewujudkan transparansi akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agensi/ Pemerintah) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal/ Masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : 1) pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertical), dan 2) pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai risiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Sehingga tujuan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas baik di lembaga pusat khususnya daerah akan dapat terwujud.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelolaan atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

b. Tujuan Laporan keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Adapun Tujuan penyusunan laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 paragraph 23 disebutkan bahwa, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

C. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggung jawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Adapun laporan keuangan dapat dikatakan sudah berkualitas jika bisa memenuhi beberapa syarat karakteristik-karakteristik kualitas sesuai PP No.71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan biasanya dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi-informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

2. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

3. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kompetensi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2013 pasal 1 tentang kompetensi, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional

Spencer dan Spencer (1993) menunjukkan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang terdiri dari knowledge, skill, attitude yang ada hubungan sebab akibatnya dengan prestasi

kerja yang luar biasa atau dengan efektifitas kerja.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 46 A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

1. Pengetahuan (knowledge) yaitu fakta dan angka dibalik aspek-aspek teknis
2. Keahlian/keterampilan (Skills), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat criteria yang dapat diterima secara terus menerus, dengan kegiatan yang paling sedikit.
3. Sikap (attitude), yaitu yang ditunjukkan kepada atasan atau orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

b. Kompetensi SDM keuangan pemerintah daerah

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu yang berkaitan langsung dengan keuangan organisasi baik dalam mencatat, menyusun, mengelola, maupun menghasilkan laporan keuangan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut yaitu dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan akuntansi yang telah ditetapkan oleh IFAC (*International Federation Of Accountants*), yakni IES (*International Education Standards*), dalam hal ini IES 2, IES 3, IES 4 yang mencakup dimensi *knowledge, skills, attitude*

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meliputi perangkat keras dan perangkat lunak saja namun juga meliputi :

komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011).

Menurut Widyaningrum (2010) Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya :

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

1. Bagian ekonomi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
8. Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan Mustafa (2011) memberikan bukti adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi salah satunya yaitu ketepatanwaktuan.

3. Pengendalian Intern

Menurut I Gusti Agung Rai (2008), pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakandan kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

a. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur-unsur sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat

(*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Menurut Indra (2011) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

3. Kegiatan Pengendalian

Menurut Indra (2011), aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif,

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut Indra (2011) Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan

dengan sistem akuntansi adalah kebijakan dan prosedur atas transaksi yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yaitu informasi yang berhubungan dengan peristiwa peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Menurut Indra (2011), Proses penilaian kualitas kinerja diukur dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu dan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam melaksanakan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang terfokus pada sektor publik diantaranya Indriasari

dan Nahartyo (2008), Roviyantie (2011), Zuliarti (2012), Ruri (2013), dan Hendrick (2014).

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan hubungan nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi. Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan tetapi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif.

Penelitian Roviyantie (2011) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap informasi pelaporan keuangan. Sejalan dengan Roviyantie (2011), Penelitian Ruri (2013) juga mengatakan terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Hendrick (2014) berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan.

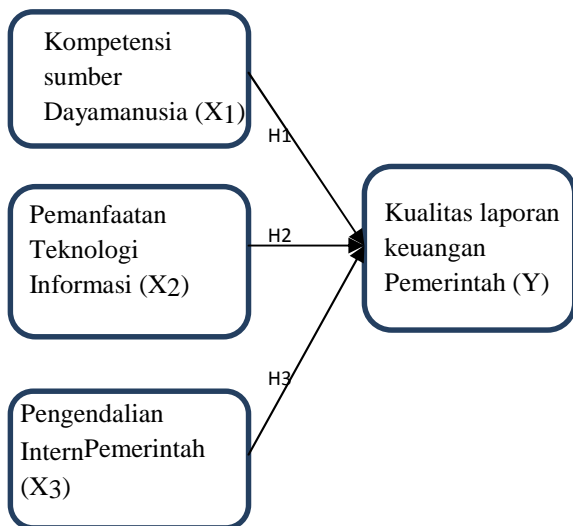
Sedangkan penelitian Emilda (2014) menunjukkan Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan menggunakan faktor lain sebagai penguji yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak berpengaruh positif signifikan, meskipun studi empiris sama dengan peneliti yaitu di Kabupaten Limapuluh Kota.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkap keterkaitan antara variabel

yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dari kajian-kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh hubungan antara variable terikat, yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah.

Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



C. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, kajian teori dan kerangka konseptual yang telah dibuat, maka didapat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Husein, 2005). Jadi, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kompetensi SDM, Pemanfaatan teknologi informasi pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD yang ada di Kabupaten berjumlah 30 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat Penelitian ini menggunakan *totalsampling*. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubag bagian ekonomi/keuangan dan staf bagian ekonomi/keuangan pada setiap SKPD, dengan total responden 60 orang dengan 2 orang pada setiap masing-masing SKPD yang berjumlah 30 SKPD. Alasan pemilihan responden adalah karena kasubag bagian ekonomi/keuangan berwenang dalam mengambil keputusan terkait laporan keuangan dan staf bagian ekonomi/keuangan sebagai elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan sangat memahami kegiatan pemrosesan laporan keuangan.

C. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjektif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dengan menggunakan pertanyaan lisan atau tertulis.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban :

Tabel . Skala Pengukuran

Skala Likert	Sifat Pertanyaan	
	Positif (+)	Negatif (-)
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Kurang Setuju (KS)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Kuesioner adalah daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan pada responden. Kuesioner diberikan kepada staf bagian ekonomi/keuangan di SKPD tersebut. Kuesioner akan langsung diantarkan ke SKPD yang ada di Instansi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Langkah ini digunakan untuk mengantisipasi rendahnya respon dari responden dalam mengisi kuesioner. Setelah itu, kuesioner akan dikumpulkan kembali dengan menjemputnya secara langsung.

F. Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai (Sekaran,2006). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam variabel penelitian.

1. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006).Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen adalah variable yang mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran,2006). Variabel bebas pada penelitian ini ada 3 sebagai berikut :

- a. Kompetensi SDM (X_1)
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3)

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007).

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka nomor item tersebut tidak valid dan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *cronbach's alpha*, jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel.

H. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila suatu penelitian menggunakan metode Regresi Berganda. Menurut Sekaran (2006), analisis berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Data yang akan diolah dengan regresi berganda dibantu oleh SPSS, harus memenuhi asumsi - asumsi tertentu agar model regresi tidak bias.

Terdapat asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar tidak terjadi respon bias. yaitu:

1. Uji Normalitas Residual

Pengujian Normalitas Residual dapat digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas pengamatan ke pengamatan lain.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji gletser. Dalam uji ini, apabila hasilnya sig > 0,05, maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Sebelum melakukan analisis data dengan menggunakan Regresi Berganda, maka dilakukan uji Multikoleniaritas. Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel -variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut di eliminir. Untuk menguji adanya multikolienaritas, dapat dilihat melalui varians *inflation factor* (VIF) < 10 dan tolerance > 0,1.

I. Model dan Teknik Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Alat yang digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Teknik Analisis

a. Analisis Deskriptif

a) Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b) Menghitung Nilai Jawaban

a) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan oleh responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.

b) Menghitung rata rata skor total item dengan menggunakan rumus :

$$\frac{5SS + 4S + 3R + 2TS + 1STS}{15}$$

dimana:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

R = Ragu-ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

c) Menghitung nilai rerata jawaban responden dimana

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n Xi}{n}$$

Dimana :

Xi = Skor total

n = jumlah responden

d) Menghitung nilai TCR masing masing kategori jawaban dari deskriptif variabel.

$$\text{TCR} = \frac{RS}{n} \times 100$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

R_s = Rata - rata Skor jawaban responden

n = Nilai Skor Jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- 1) Interval jawaban responden 76-100% kategori jawaban baik
- 2) Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabann cukup baik
- 3) Interval jawaban responden < 56% kategori jawaban kurang baik.

b) Uji Model (Uji F)

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi berganda karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel dependen mampu menjelaskan variabel independen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikasi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikasi maka model yang digunakan sudah *fix*. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan:

F = Uji F

R^2 = Koefisien Determinan

K = Jumlah Variabel Bebas

n = Jumlah Sampel

c) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*coefficient of determination / R-squared*) adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibangun. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefien determinasi adalah nol atau satu. Nilai adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Menurut Ghazali (2012) jika dalam pengujian nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 di anggap nol.

d) Uji Hipotesis (uji T)

- 1) Jika tingkat signifikannya $\alpha < 0,05$ dan koefisiennya positif, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti tersedia bukti cukup untuk menerima hipotesis alternatif H_1 dan H_2 , dengan demikian dapat dikatakan sistem pengukuran kinerja dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
- 2) Jika tingkat signifikan $\alpha > 0,05$ dan koefisiennya negatif, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan

dapat dikatakan sistem pengukuran kinerja dan Kompensasi tidak berpengaruh terhadap pengukuran kinerja manajerial.

- 3) Jika tingkat signifikannya $< = 0,05$ tetapi koefisiennya negatif, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan Hipotesis alternatif H_1 dan H_2 ditolak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pengukuran kinerja dan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah tiga puluh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Setiap sampel masing-masing terdiri dari dua responden. Dari tiga puluh sampel tersebut, disebarkan sebanyak 60 kuesioner. Sebanyak 5 SKPD menolak untuk mengisi kuesioner dengan alasan kesibukan. Sehingga kuesioner yang dapat disebarkan hanya 50 buah untuk 25 SKPD. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 50 kuesioner. Terdapat 10 kuesioner merupakan kuisoner yang kosong karena dalam SKPD tersebut hanya bisa mengisi satu atau dua kuesioner

saja, 1 kuesioner tidak diisi dengan lengkap, dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah 49 kuesioner. Gambaran penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebarkan	60
Jumlah kuesioner yang kembali	50
Jumlah kuesioner yang diisi lengkap dan dapat diolah	49
<i>Respon Rate</i>	81,67%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 5 diatas, terlihat bahwa responden mengisi dan mengembalikan kuesioner dengan *respon rate* sebesar **81,67%**. Kuesioner diantarkan dan dijemput langsung kepada responden penelitian.

B. Demografi Responden

1. Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui beberapa karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Karakteristik responden tersebut disajikan dalam tabel table berikut :

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan, diperoleh data mengenai latar belakang pendidikan responden. Proporsi responden berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase
1	SLTA	9	18,37%
2	Diploma III	7	14,29%
3	Strata I	29	59,18%
4	Starata II	4	8,16%
Jumlah		49	100%

Sumber : *Data primer yang diolah*

b. Berdasarkan Lama Pengalaman Kerja

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan, diperoleh data tentang lama bekerja responden, proporsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Lamanya	Jumlah	Persentase
1	1 - 5 tahun	9	18,37%
2	6 - 10 tahun	26	53,06%
3	> 10 tahun	14	28,57%
Jumlah		49	100 %

Sumber : *Data primer yang diolah*

c. Berdasarkan Usia

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan, diperoleh data mengenai usia responden. Proporsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1	20- 30 Tahun	5	10,20%
2	30- 40 Tahun	19	38,78%
3	40- 50 Tahun	14	28,57%
4	>50 Tahun	11	22,45%
Jumlah		49	100%

Sumber : *Data primer yang diolah*

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun total capaian responden yang diperoleh tergambar dalam table berikut :

Instrumen Variabel	TCR	Kategori
Kualitas laporan keuangan (Y)	84,73%	Sangat Baik
Kompetensi SDM (X ₁)	73,18%	Baik
Pemanfaatan Teknologi Informasi(X ₂)	63,80%	Baik
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	87,51%	Sangat Baik

D. Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H_1) yaitu Kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini berarti bahwa hubungan kompetensi SDM searah dengan kualitas laporan keuangan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki satker (satuan kerja) Subbagian ekonomi/keuangan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan mereka hasilkan sebagai petugas penyusun laporan keuangan.

Variabel kompetensi SDM (X_1) memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 0,330. Hal ini mengindikasikan bahwa jika kompetensi SDM meningkat satu satuan, maka Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,330. Ini berarti variabel kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian peneliti juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mcleod (2003) faktor internal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai informasi akuntansi antara lain adalah tersedianya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dalam hal memiliki pendidikan, dan

pelatihan dan juga pengalaman yang memadai. Menurut Widyaningrum (2010) Kondisi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang sudah mendukung dan juga diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah sangat membantu dalam meningkatkan baik buruknya kualitas suatu laporan keuangan. SDM yang dapat dikatakan baik sebagai penyelenggara aparatur negara ditandai dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dan mampu beradaptasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil temuan yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Emilda (2014) dan Rovieyanti (2011), dimana kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian

Indriasari dan Nahartyo (2008) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri, yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Ketidaksignifikanan ini disebabkan kondisi kualitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mendukung. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya pada Kabupaten Indragiri.

2. Pengaruh Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H_2) yaitu pemanfaatan teknologi informasi TI tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan memiliki nilai sig. $0,721 > 0,05$. Ini berarti bahwa pemanfaatan TI tidak memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini juga berarti bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan TI

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Seno (2013) dan Pramudiarta (2015), dimana pemanfaatan teknologi informasi juga tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wilkinson (2000), dimana sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan aktivitas memerlukan elemen yang spesifik yang bervariasi tergantung pada tingkat otomatisasi sistem informasi akuntansi tersebut. Hal ini berarti jika tingkat kecanggihan dan pemanfaatan TI akan tidak berpengaruh jika nilai pemanfaatan dan kecanggihan TI yang digunakan juga rendah. Dengan demikian masih diperlukan adanya seperangkat alat berupa elemen software yang lain untuk memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Namun hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah masih mengalami hambatan karena peralatan dan software pendukung yang masih sering mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama dan berdampak pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami penyesuaian atau

mengalami kemunduran dan ini berimplikasi pada ketidaktepatan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel distribusi frekuensi pemanfaatan TI (X_2), nilai total capaian responden (TCR) yang terendah terdapat pada item nomor 8 yaitu dengan nilai TCR sebesar 69,39%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa peralatan yang rusak dan usang tidak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya sehingga menimbulkan beberapa hambatan bagi aparatur penyusun laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemda di Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti juga berasumsi ada keterbatasan teknologi yang dimiliki serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang tidak dapat mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam proses akuntansi dikarenakan dominan responden berusia diatas 40 dan >50 tahun sebesar 51,02% (dapat dilihat pada tabel 8 diatas), dimana pada usia kategori berikut responden cenderung sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat saat ini.

Hussein (2005) menyatakan bahwa perkembangan berbagai macam teknologi informasi terutama komputer dan internet membuat pergeseran tata cara pelayanan publik menjadi sistem online yang terkomputerisasi. Dalam hal

penyusunan pelaporan keuangan organisasi telah memanfaatkan berbagai software yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Penggunaan software akuntansi tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas terutama berkaitan dengan akurasi dan kecepatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 59 ayat 2 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi teknologi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah guna mengimbangi tuntutan akuntabilitas baik di lembaga pusat maupun daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas laporan keuangan

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yaitu sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Ini berarti bahwa hubungan SPI searah dengan kualitas laporan keuangan, semakin tinggi sistem pengendalian intern maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Variabel pengendalian intern (X_3) memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 0,247. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian intern meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,247. Ini berarti variabel pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arens (2008:370), Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif adalah agar laporan keuangan reliabel.

Adapun terdapat beberapa langkah taktis untuk meningkatkan pengendalian intern menurut Tuti (2014), yaitu (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meningkatkan lingkungan pengendalian dengan memperhatikan komitmen terhadap kompetensi, (2)

memiliki prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan, (3) Dalam meningkatkan penilaian resiko, Instansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan (4) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meningkatkan informasi dan komunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya (5) mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah, pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan pelimpah tugas secara sistematis ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya *checks and balances*. Sebaiknya aparat pengawasan (Inspektorat Daerah) hendaknya lebih efektif dalam melakukan pembinaan seperti melakukan kontrol secara rutin pada

SKPD pada lingkungan Pemerintahan.

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) dan Nurillah (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengendalian intern suatu instansi maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan kata lain sistem pengendalian intern yang yang dapat dikatakan baik ialah SPI yang mampu menekan, mencegah, mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja) segala kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan aparatur pemerintah negara. Berdasarkan data distribusi frekuensi SPI dapat dilihat tingkat capaian responden sebesar 87,51% yang berarti TCR berada pada kategori sangat baik, ini menandakan secara keseluruhan responden menjawab setuju bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan positif

terhadap kualitas laporan keuangan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintahan kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R²* sebesar 49,20%. berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variable independen hanya sebesar 49,20%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar lagi untuk kualitas laporan keuangan.
2. Keterbatasan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data menghambat peneliti untuk melakukan uji coba kolektif data kuesioner guna memperbesar atau menambah jumlah sampel atau obyek penelitian yang digunakan dan untuk memperluas lingkup penelitian.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini. Misalnya untuk variabel dependen seperti pengawasan keuangan daerah, *Good coporate governance (GCG)*, kejelasan tujuan, penerapan sistem akuntansi pemerintahan (SAP) dan untuk variabel independen seperti ketepatanwaktu, umpan balik (*feedback value*) atau keterandalan pelaporan laporan keuangan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah masih mengalami hambatan karena peralatan dan software pendukung yang masih sering mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama dan berdampak pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami penyesuaian atau mengalami kemunduran dan ini berimplikasi pada ketidaktepatan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan itu sendiri. Agar pemanfaatan teknologi informasi dapat terlaksana dengan efektif, sebaiknya peralatan yang usang/rusak didata secepat mungkin. Sehingga kegiatan pembuatan laporan keuangan tidak terganggu oleh peralatan yang rusak tersebut. maka laporan keuangan SKPD dapat dihasilkan tepat waktu.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya sehingga data yang diperoleh belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti mengembangkan item pernyataan kuesioner kepada responden dengan pernyataan yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas lebih tinggi.
4. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data, proses penelitian diperpanjang agar peneliti memiliki waktu untuk uji coba dan kolekting data kuesioner

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Desiana wati, Kadek dkk, 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah* : e-journal S1 ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No 1.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harifan Handriko. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi, dan Pengendalian Intern Akuntans terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*, Padang. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang (Tidak Dipublikasikan)
- Husein Umar, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat diakses
- I Gusti Agung Rai. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ihsanti, Emilda, 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah* : Skripsi FE e-journal unp.ac.id.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriasari, Desi, 2008. *Pengaruh Kapasitas sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah* : Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak
- Jurnali, teddy & Bambang Supomo. 2002. *Pengaruh Faktor kesesuaian tugas teknologi dan pemanfaatan TI terhadap kinerja akuntan public*. *jurnal riset akuntansi Indonesia*. Vol 5 No. 2. Hal 214-228

- Mcleod, Raymond, George Schell. 2004. *Management Information System*. 9th edition. New Jersey. Prentice Hall Inc
- Muzahid, Muhklisul, 2014. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Aceh Utara* : Skripsi Unri.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Siliwangi.
- Spencer, Peter M., & Signe M. Spencer. (1993). *Competence at Work "Models for Superior Performance"*. New York: JhonWiley & Sons Inc.
- Uma Sekaran, 2006. *Research Methods For Business*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Winidyaningrum, Celviana, 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Peman-faan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*.Jurnal SNA X111. UniversitasSebelas Maret Surakarta.
- Wilkinson,Joseph W.,et.al. 2000. *Accounting Information system*. Fourth Edition. New York: John wiley & Sons.
- BPK RI Perwakilan Propinsi Provinsi Sumatera Barat » Penyerahan LHP Manajemen Aset Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Sawahlunto. html (<http://padang.bpk.go.id/?p=5506>)
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui (www.google.com)[22/04/2016]
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2013 pasal 1 (www.google.com) [22/04/2016.]
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004 (BNSP) (www.google.com)[22/04/2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,(www.google.com) [22/04/2016.]
- PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun2008(SPIP)(www.google.com) [22/04/2016].

LAMPIRAN. HASIL OLAH DATA SPSS

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

1. KOMPETENSI SDM

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	49	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	49	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.873	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	33.27	15.991	.626	.861
VAR00002	32.61	16.034	.774	.844
VAR00003	32.12	17.985	.592	.862
VAR00004	32.22	18.928	.384	.878
VAR00005	32.55	16.544	.731	.849
VAR00006	32.35	17.023	.691	.853
VAR00007	32.71	16.833	.724	.850
VAR00008	32.27	19.282	.301	.884
VAR00009	32.63	16.362	.700	.851

2. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	49	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	49	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.716	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	27.7959	12.082	.420	.686
VAR00002	28.0204	10.229	.567	.648
VAR00003	27.8163	11.945	.376	.695
VAR00004	27.5102	13.130	.299	.708
VAR00005	27.6939	12.967	.308	.706
VAR00006	27.7347	13.366	.257	.714
VAR00007	28.2857	10.583	.535	.657
VAR00008	28.4286	10.833	.468	.675

3. PENGENDALIAN INTERN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	49	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	49	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	39.0204	34.645	.262	.881
VAR00002	39.5918	31.205	.424	.877
VAR00003	39.8367	30.098	.707	.857
VAR00004	40.2449	29.480	.671	.858
VAR00005	40.3469	28.731	.765	.851
VAR00006	39.7347	29.699	.684	.857
VAR00007	39.7551	30.480	.715	.857
VAR00008	39.6939	28.717	.687	.857
VAR00009	39.5918	31.288	.479	.871
VAR00010	40.0612	29.642	.673	.858
VAR00011	39.6735	32.558	.346	.880

4. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	49	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	49	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.764	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	37.8367	14.181	.326	.756
VAR00002	37.7347	13.491	.561	.733
VAR00003	38.4490	13.003	.371	.754
VAR00004	38.2041	12.291	.564	.724
VAR00005	37.8367	13.139	.507	.734
VAR00006	38.2041	13.082	.590	.726
VAR00007	37.8571	13.667	.542	.736
VAR00008	37.9388	13.684	.452	.743
VAR00009	38.8367	12.764	.358	.760
VAR00010	38.4082	13.247	.268	.776

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	49	35	50	42.37	3.993
X1	49	25	45	36.59	4.632
X2	49	20	40	31.90	3.864
X3	49	26	55	43.76	6.047
Valid N (listwise)	49				

UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.75491462
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.078
	Negative	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		.885
Asymp. Sig. (2-tailed)		.413

a. Test distribution is Normal.

2. UJI HETEROSKEDATISITAS

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Model					

1	(Constant)	5.020	2.097		2.394	.021
	X1	.018	.068	.052	.260	.796
	X2	-.130	.076	-.320	-1.713	.094
	X3	.017	.055	.064	.303	.763

a. Dependent Variable: RES2

3. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.515	1.942
	X2	.592	1.690
	X3	.463	2.158

a. Dependent Variable: Y

UJI MODEL

1. UJI F STATISTIK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	401.089	3	133.696	16.515	.000 ^a
	Residual	364.299	45	8.096		
	Total	765.388	48			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

2. UJI ADJUSTED R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.492	2.845

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

3. UJI T STATISTIK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.896	3.808		4.699	.000
	X1	.330	.124	.383	2.675	.010
	X2	.050	.138	.048	.360	.721
	X3	.247	.100	.374	2.472	.017

a. Dependent Variable: Y